

## Kertas Posisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk COP 15 UNFCCC

### ” Kesempatan Terakhir Bagi Dunia Untuk Wujudkan Keadilan Iklim”

#### Saatnya menentukan arah kedepan...

Perubahan iklim merupakan salah satu bukti kegagalan model pembangunan yang selama ini dipraktekkan dunia, terutama di negara maju. Sayangnya solusi yang ditawarkan UNFCCC tidak mampu mengatasi masalah perubahan iklim. Pengurangan emisi secara global, tujuan yang menjadi mandat UNFCCC terlupakan, dan kian mengarah kepada praktek *business as usual*.

COP 15 yang akan diadakan di Copenhagen pada Desember 2009 merupakan titik terpenting dari negosiasi perubahan iklim. Karenanya COP 15 harus dapat mengarahkan dunia kembali kepada tujuan awal dari UNFCCC.

Rangkaian pertemuan dengan pembahasan berbagai isu tematik (menuju Copenhagen) diselenggarakan UNFCCC sejak Februari 2009. Namun berbagai perundingan, belum dapat mencapai kesepakatan tentang seberapa besar penurunan emisi gas rumah kaca bagi negara maju setelah periode Kyoto Protokol. Komitmen negara maju dalam upaya memotong emisinya harus kembali dipertanyakan.

Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim, dituntut untuk dapat memainkan peran dalam mengarahkan arah negosiasi yaitu: tetap fokus pada penurunan emisi secara nyata (tingkat karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dunia dijaga tidak lebih dari 450 ppm)<sup>1</sup> dan memastikan tidak ada kenaikan temperatur global diatas 2°C. Tidak dipenuhinya komitmen tersebut akan berakhir katastropik, dan merugikan Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

---

1

*Only huge emissions cuts will curb climate change*, Jenny Hogan, Exeter

(<http://www.newscientist.com/article/dn6964-only-huge-emissions-cuts-will-curb-climate-change.html> )

## ***H.E.L.P for all of us, now...!!***

Masyarakat sipil Indonesia meminta pada dunia, terutama perwakilan negara yang hadir dalam Bonn Climate Change Talks II (1-12 Juni 2009), untuk bertindak menyelamatkan kehidupan kita bersama. Salah satunya dengan mengadopsi konsep *HELP* dalam menangani perubahan iklim.

HELP, merupakan konsep yang menjadi panduan utama bagi masyarakat sipil Indonesia untuk mengatasi masalah perubahan iklim. HELP terfokus pada *Human Security, Ecological Debt, Livelihood Tenure Security, dan Production and*



*Consumption.* HELP merupakan permasalahan dasar penyebab perubahan iklim, sekaligus tawaran bagi dunia untuk mencari solusi bagi perubahan iklim.

Kami meminta agar semua pembicaraan negosiasi Juni, baik **mitigasi** maupun **adaptasi** mengadopsi keempat unsur HELP dalam setiap keputusan yang dihasilkan. Keempat unsur tersebut adalah (a) tidak terabaikan keselamatan manusia (*human security*) khususnya kelompok-kelompok rentan, dari tingkat negara hingga individu terutama perempuan, dan anak-anak; serta manula, (b) pemenuhan hak asasi manusia dalam keamanan pengelolaan sumber-sumber penghidupan (*livelihood tenure security*); (c) hutang ekologis (*ecological debt*) negara-negara maju yang wajib dibayar, karena besarnya *historical emissions* selama proses eksploitasi yang dilakukan; (d) pola produksi konsumsi (*production consumption*) yang cenderung semakin konsumtif di sebagian besar masyarakat negara-negara Utara dan sebagian kecil kelompok di negara-negara Selatan.

Keempat hal tersebut, masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan *human development index* yang dikeluarkan UNDP, tingkat kemiskinan Indonesia menduduki peringkat 47 (UNDP, 2008). Hal ini membuktikan juga bahwa berbagai solusi yang ditawarkan UNFCCC gagal menjawab tantangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Akibatnya, masyarakat di negara berkembang, termasuk masyarakat adat dan lokal, yang bukan penyebab terjadinya perubahan iklim, merasakan dampaknya dan harus menanggung beban akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Padahal, selama ini masyarakat adat hidup berdampingan dengan alam, dan menerapkan praktek ramah lingkungan yang berkelanjutan. Namun, masyarakat internasional tidak memberikan pengakuan bagi perannya dalam menjaga alam.

**Saatnya berubah arah..**

Masyarakat sipil Indonesia tidak akan mentolerir jika skema-skema penanganan perubahan iklim yang ditawarkan berpotensi merugikan masyarakat. Setiap tindakan konkrit untuk mengatasi dampak perubahan iklim harus diambil namun tetap menjamin hak masyarakat.

Perundingan Juni salah satu agendanya akan membicarakan draft amandemen Protokol Kyoto, untuk itu Indonesia seharusnya bisa memastikan agar negara Annex 1 memenuhi komitmen yang dibuat sebelumnya. Tanpa ada kejelasan untuk pengurangan emisi negara Annex 1, amandemen tidak akan bermanfaat secara optimal.

Mekanisme pendanaan dalam tindakan penyelesaian masalah perubahan iklim tidak boleh lagi bergantung pada model hutang, karena hutang pada akhirnya hanya akan menjerat masyarakat. Manipulasi pengurangan emisi negara maju melalui mekanisme *offset* juga tidak dapat lagi dilanjutkan karena tidak akan dapat menstabilisasi volume GRK secara global. Sehingga akan semakin menjauh dari tujuan awal konvensi perubahan iklim untuk stabilisasi emisi secara global



(art 2 dari konvensi). Pertemuan Juni ini merupakan saat yang tepat untuk merubah arah perjalanan pembicaraan perubahan iklim.

Untuk itu masyarakat sipil Indonesia mendesak supaya UNFCCC mengadopsi konsep HELP dalam solusi perubahan iklim yang ditawarkannya. Hal ini terwujud dalam :

1. Negara maju melaksanakan komitmen pemotongan emisinya sebesar 40 % pada tahun 2020 pengurangan emisi tersebut harus dilakukan secara domestik.
2. Pembiayaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan secara transparan, demokratis dan akuntabel, serta tidak dimasukkan ke dalam sistem pasar dan tidak dalam bentuk hutang.
3. Menghentikan bantuan (hutang, hibah, dan atau bantuan teknis) untuk proyek-proyek yang mendukung industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan teknologi kotor, seperti nuklir<sup>2</sup> dan *advance coal*<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Teknologi nuklir dianggap sebagai teknologi bersih karena tidak mengeluarkan emisi CO<sub>2</sub>, namun banyak penelitian menyebutkan tiga masalah utama nuklir yaitu keamanan dan keandalannya meragukan, ketidak mampuan mengelola limbah radioaktif serta biaya yang tinggi (Greenpeace, 2006 dan Corporate watch 2007).

<sup>3</sup> *Advance coal* atau *clean coal technology*, merupakan teknologi yang diklaim sebagai salah

4. Ekosistem rawa gambut dan laut sebagai penyeimbang iklim mikro dan makro yang sangat erat dengan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat di Indonesia harus menjadi landasan dasar konservasi karbon dunia, apalagi mengingat karakteristik kedua ekosistem ini yang telah menimbun karbon selama berjuta-juta tahun.

5. Upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan tidak boleh menimbulkan masalah baru, seperti konversi lahan tanaman pangan ke lahan tanaman bahan baku biofuel yang akan mengurangi kapasitas produksi pangan.

6. Pengelolaan hutang ekologis sebaiknya dilakukan melalui mekanisme *transitional justice*. Kejahatan-kejahatan lingkungan harus diproses terlebih dahulu untuk menegakkan keadilan kepada para korban, dan untuk pemulihan ekosistem yang telah dirusak dalam praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam oleh para korporasi multi nasional.



7. Pemenuhan hak-hak masyarakat (terutama kelompok rentan seperti manula, perempuan, dan anak-anak) di dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

8. Negara maju berkewajiban mengontrol dan mengevaluasi investasi-investasinya di sektor kehutanan-perkebunan, dimana kedua sektor ini memasok kebutuhan primer mereka, yang berdampak kepada pembukaan kawasan hutan dan rawa gambut di Indonesia untuk industri perkebunan sawit dan hutan tanaman industri,

9. Negara maju harus memastikan proyek-proyek uji coba dan modeling REDD (reducing emission from deforestation and degradation) yang pendanaannya dari mereka tidak melanggar hak-hak masyarakat terhadap kawasan adat, hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.

Jakarta, 7 Juni 2009

#### Civil Society For Climate Justice

---

satu solusi pengganti penggunaan batu bara dan juga diklaim sebagai salah satu teknologi bersih. Namun kenyataannya masih banyak yang meragukan "kebersihan" dari teknologi tersebut. Sumbernya <http://www.greenpeace.org/seasia/en/asia-energy-revolution/dirty-energy/clean-coal-myth/clean-coal-myths-and-facts>.

